

B. FORMAT PERMOHONAN NPPBKC

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Perihal : Permohonan Mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha  
Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai .....(3).....  
.....(4).....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai .....(5).....  
di .....(6).....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : .....(7).....;  
pekerjaan/jabatan : .....(8).....;  
alamat : .....(9).....;  
nomor telepon : .....(10).....;  
alamat posel (*e-mail*) : .....(11).....;

Bertindak atas nama:

nama pemilik : .....(12).....;  
alamat pemilik : .....(13).....;  
NPWP pemilik : .....(14).....;  
nomor telepon : .....(15).....;  
alamat posel (*e-mail*) : .....(16).....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai  
.....(3)..... Barang Kena Cukai Berupa .....(4)..... dengan  
rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan:

a. nama : .....(17).....;  
b. alamat : .....(18).....;  
c. NPWP : .....(19).....;  
d. nomor telepon : .....(20).....;  
e. alamat posel (*e-mail*) : .....(21).....

2. Lokasi Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Usaha Importir/Tempat  
Usaha Penyalur/Tempat Penjualan Eceran\*):

a. Lokasi 1:

1) kegunaan : .....(22).....;  
2) alamat : .....(23).....;  
3) kelurahan/desa : .....(24).....RT/RW.....(25).....;  
4) kecamatan : .....(26).....;  
5) kabupaten/kota : .....(27).....;  
6) provinsi : .....(28).....;  
7) koordinat/geolokasi : .....(29).....

- b. Lokasi 2:
- 1) kegunaan : .....(22).....;
  - 2) alamat : .....(23).....;
  - 3) kelurahan/desa : .....(24).....RT/RW.....(25).....;
  - 4) kecamatan : .....(26).....;
  - 5) kabupaten/kota : .....(27).....;
  - 6) provinsi : .....(28).....;
  - 7) koordinat/geolokasi : .....(29).....

c. dst.

3. Izin usaha dari instansi terkait:

- a. jenis izin : .....(30).....;
- b. nomor : .....(31).....;
- c. tanggal : .....(32).....

4. Luas lokasi, luas bangunan, dan batas-batas lokasi yang akan dijadikan tempat usaha sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan lokasi nomor .....(33)..... tanggal .....(34).....

5. Lampiran-lampiran:

- a. berita acara pemeriksaan lokasi;
- b. salinan/fotokopi izin usaha dari instansi terkait;
- c. daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai telah dimiliki (khusus untuk pabrik);
- d. daftar penyalur tingkat pertama (khusus untuk pabrik hasil tembakau); dan
- e. lampiran lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di .....(35).....;

pada tanggal  
.....(36).....;

Pemohon,

Materai

.....(7).....;

\*) Pilih yang diperlukan

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor tempat pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya “Manado”.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama kota Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya “Manado”.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat lengkap orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektronik orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor telepon pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektronik pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

4

- Nomor (18) : Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.
- Nomor (19) : Diisi dengan NPWP perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.
- Nomor (21) : Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektronik perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.
- Nomor (22) : Diisi dengan kegunaan lokasi bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya, misalnya “membuat barang kena cukai”, “mengemas barang kena cukai”, “menyimpan bahan baku atau bahan penolong”, “menimbun barang kena cukai yang selesai dibuat”, dan/atau “menimbun barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya”.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama jalan dari lokasi/tempat usaha.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kelurahan/desa dari lokasi/tempat usaha.
- Nomor (25) : Diisi dengan angka yang menunjukkan RT dan RW dari lokasi/tempat usaha.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama kecamatan dari lokasi/tempat usaha.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama kabupaten/kota dari lokasi/tempat usaha.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama provinsi dari lokasi/tempat usaha.
- Nomor (29) : Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama untuk memasuki lokasi/tempat usaha, misalnya titik koordinat adalah “(-6.2063198,106.8762640)”.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama dokumen:  
izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik, misalnya “Izin Usaha Industri” atau;  
izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata, dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan,

ca  
f

Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, misalnya "Surat Izin Usaha Perdagangan".

- Nomor (31) : Diisi dengan nomor izin usaha dari instansi terkait dari dokumen yang diisikan pada Nomor (30);
- Nomor (32) : Diisi dengan tanggal izin usaha dari instansi terkait dari dokumen yang diisikan pada Nomor (30);
- Nomor (33) : Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal berita acara pemeriksaan lokasi.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama kota permohonan NPPBKC dibuat.
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan NPPBKC dibuat.

Handwritten marks: a vertical line and a stylized signature or mark.